



**Judul** : Enam Pimpinan Instansi Segera Konsolidasi  
**Tanggal** : Kamis, 13 April 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

# Enam Pimpinan Instansi Segera Konsolidasi

Lima dari enam pimpinan instansi terkait sudah memberi persetujuan pada draf RUU Perampasan Aset. Kepala Polri akan segera menyusul memberi paraf persetujuan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Untuk mempercepat penyerahan surat presiden terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pemerintah akan menggelar rapat konsolidasi percepatan pemberian persetujuan draf aturan itu. Drencanakan, Jumat (14/4/2023), enam pimpinan instansi yang dimintai persetujuan draf naskah akademik dan RUU akan dikumpulkan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Langkah itu dilakukan untuk mempercepat pemberian persetujuan terhadap draf naskah akademik dan RUU Perampasan Aset. Hingga Rabu (12/4), ada satu pimpinan lembaga yang belum memberi paraf persetujuan, yaitu Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Karena belum semua pimpinan instansi memberi persetujuan, surat presiden (surpres) sebagai tanda RUU akan dibahas bersama belum bisa dikirimkan ke DPR.

Pimpinan lima instansi lainnya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H Laoly; dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiawandana sudah memberikan paraf persetujuan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah menyusul memberikan paraf persetujuan pekan ini. Namun, selain memberikan paraf, mereka juga membubuhkan catatan.

Mahfud MD saat dihubungi, Rabu (12/4), membenarkan informasi bahwa Jumat pekan ini enam pimpinan kementerian dan lembaga akan diundang untuk rapat konsolidasi internal di kantornya. Menurut Mahfud, secara umum RUU Perampasan Aset sudah selesai, tinggal tersisa satu paraf lagi. Karena itu, perlu upaya percepatan agar surpres bisa segera dikirim ke DPR. "Insya Allah, sesudah Lebaran dikirim surpres RUU Perampasan Aset ke DPR," katanya.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo sangat serius dengan RUU tersebut. Keseriusan itu diperlihatkan dalam tiga kali pidato di kesempatan yang berbeda. Dia mencatat, permintaan

percepatan RUU Perampasan Aset disampaikan pada saat Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2022, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2022, dan terakhir saat konferensi pers bersama antara Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara pada 7 Februari 2023.

"Pemerintah berterima kasih kepada DPR yang telah merespons dorongan itu dan menyatakan menunggu pengajuan RUU Perampasan Aset dari Pemerintah," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Hukum dan Regulasi PPATK Fithriadi Muslim mengatakan, posisi terkini draf RUU Perampasan Aset sudah ditandatangani lima pimpinan instansi. Jaksa Agung ST Burhanuddin baru memberikan paraf pada hari Rabu (12/4), dan tinggal menunggu paraf persetujuan dari Kapolri.

Selain memberikan paraf, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga membubuhkan catatan terkait proses lelang. Pihaknya meminta pengaturan mengenai

mekanisme lelang dalam RUU Perampasan Aset yang mengacu ke undang-undang terkait lelang.

"Bisa saja menteri memberikan catatan setelah proses harmonisasi. Nanti Kementerian Sekretariat Negara dapat mengambil inisiatif mengumpulkan seluruh *stakeholders* atau kementerian/lembaga terkait untuk membahas catatan-catatan tersebut. Mudah-mudahan bisa langsung teratasi dalam pertemuan selanjutnya," tuturnya.

## Kapolri segera paraf

Saat dihubungi, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Rabu (12/4) malam, ia akan segera memberikan paraf persetujuan terhadap draf RUU Perampasan Aset. Sebab, berkas tersebut baru diajukan oleh staf bidang surat-menyurat Polri kemarin. Dia menyebut tidak ada kendala apa pun dalam pemberian paraf persetujuan tersebut.

"Tidak ada masalah, baru maju ke saya dari staf. Malam ini (Rabu, 12/4) saya paraf, karena baru maju barusan," kata Listyo melalui pesan singkat.

Adapun hasil jajak pendapat *Kompas* 4-6 April 2023 memotret 82,2 persen responden menilai pembahasan dan pengundangan RUU Perampasan Aset mendesak dilakukan.

Kepala PPATK periode 2002-2011 Yunus Husein mengatakan, saat ini adalah momentum paling tepat untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Sebab, pada tahun 2023 Indonesia sedang berusaha menjadi anggota tetap Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing/FATF*). Di antara negara anggota G-20, hanya Indonesia yang belum jadi anggota tetap FATF.

Beberapa kendala Indonesia tidak bisa masuk menjadi anggota tetap FATF adalah karena pengembalian aset dalam perkara pidana masih rendah. Masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Namun, jika RUU Perampasan Aset disahkan, tentu dampaknya akan positif. Sebab, Indonesia akan dinilai serius mengembalikan aset hasil tindak pidana. (DEA/BOW)